

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>14</sup> Tindakan Penyidikan dapat dilakukan dengan upaya paksa sebab tindakan tersebut adalah untuk tegaknya keadilan.<sup>15</sup>

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya adalah terang. Penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah : “Serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana”. Istilah penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati.<sup>16</sup>

Menurut R. Soesilo, penyidik berasal dari kata sidik, yang berarti terang bekas. Maksudnya penyidikan dapat membuat terang atau jelas dan penyidikan

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

<sup>15</sup> *Penyidikan Oleh Kepolisian RI*, PPATK e-learning (online), [http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod\\_page/content/8/Modul%203%20-%20Bagian%202.pdf](http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod_page/content/8/Modul%203%20-%20Bagian%202.pdf), diakses 13 Mei 2019

<sup>16</sup> Echols, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 837

memiliki arti mencari bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.<sup>17</sup>

Penyidikan merupakan suatu aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.<sup>18</sup>

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Dalam Pasal 106 KUHAP dijelaskan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Pengertian penyidik dalam KUHAP, pada ketentuan umum disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>19</sup>

Tujuan penyidikan adalah menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang

---

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 17

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 8

<sup>19</sup> Nico Ngani dan kawan-kawan, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 19

telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan tugas, penyidik memiliki wewenang<sup>21</sup> untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

---

<sup>20</sup> M. Husein harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 58.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas<sup>22</sup>:

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.

Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) KUHAP memberi penegasan bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejabat kepolisian negara.<sup>23</sup>

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut

---

<sup>22</sup> Nico Ngani dan kawan-kawan, Op.Cit, hlm. 21

<sup>23</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 45

melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.<sup>24</sup>

#### 1. Dasar Dilaksanakannya Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan apabila proses penyelidikan telah selesai dan menghasilkan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah proses penyelidikan selesai, apabila ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka penyidik harus segera menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik agar penyidik dapat segera melakukan proses penyidikan yang akan membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”.<sup>25</sup>

Penyelidikan dalam hukum acara pidana, tingkat acara pidana dibagi dalam 4 tahap<sup>26</sup>, yaitu:

1. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi negara
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau Penuntut Umum
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh jaksa

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 107 ayat (1) sampai dengan ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 101

<sup>26</sup> Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 82

4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>27</sup> Hal itu dilaksanakan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>28</sup> Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>29</sup>

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti

---

<sup>27</sup> Waluyadi, Op. Cit, hlm. 42

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Letezia Tobing, *Soal Penyidik, Penyidik, Penyidikan, dan Penyelidikan*, 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan>, diakses 13 Mei 2019

penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.<sup>30</sup>

Penyelidikan menurut fungsi teknis reserse adalah merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang KUHAP.<sup>31</sup>

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan; tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan berkas perkara kepada Penuntut Umum.<sup>32</sup>

Di dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan latar belakang, motivasi, dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan<sup>33</sup> sebagai rangkaian, atau tindakan awal dari penyidikan dalam menemukan titik terang siapa pelakunya (*dader*) yaitu:

1. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa.
3. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 102

<sup>31</sup> *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP), Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 179*

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 181

<sup>33</sup> Ibid.

4. Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan, dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Penyelidikan diintrodusir dalam KUHAP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Sebagai sub fungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan maka penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas<sup>34</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebenarnya KUHAP sudah berusaha untuk mencegah digunakannya upaya paksa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. KUHAP mengamanatkan penggunaan upaya paksa demi kepentingan umum yang luas.

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 179



Proses penyidikan dilaksanakan dengan berdasar kepada KUHAP. Khususnya Pasal yang mengatur mengenai penyidikan.

## **B. Penghentian Penyidikan**

Dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan penulis diatas terkait penyidikan dan dapat penulis simpulkan bahwa penyidikan adalah proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka.

Selanjutnya undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.<sup>35</sup> Penghentian suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakkan hukum selanjutnya.

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*
- (2) *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.*

---

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

- (3) *Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.*<sup>36</sup>

Tidak terdapat cukup bukti, jika penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya dua alat bukti). Alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP terdapat pada Pasal 184 ayat (1) yaitu :

- a. *Keterangan saksi*
- b. *Keterangan ahli*
- c. *Surat*
- d. *Petunjuk*
- e. *Keterangan tersangka*

Jika dipandang oleh penyidik bahwa dalam perkara tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan perkara akan dihentikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari penyidik dapat dan berhasil mengemukakan bukti yang memadai, maka perkara yang dihentikan dapat dibuka kembali.<sup>37</sup>

Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, polisi berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan suatu tindak pidana seperti yang diatur didalam KUHP atau

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

<sup>37</sup> Yahya Harahap, Op. Cit. Hlm. 151

aturan pidana lainnya. Dalam realitanya memang tidak begitu mudah untuk mengetahui apakah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang termasuk tindak pidana atau bukan tindak pidana. Misalnya saja antara perjanjian utang piutang dengan penipuan. Masalah ini terkadang sulit untuk dibedakan apakah masuk perkara pidana atau masuk perkara perdata.<sup>38</sup>

Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>39</sup>.

Pasal 76 KUHP, *Nebis In Idem*. Seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 77 KUHP, Tersangka meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 78 KUHP, karena daluwarsa. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan, dengan sendirinya menurut hukum

---

<sup>38</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.26-27

<sup>39</sup> Lihat Pasal 76 - Pasal 78 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam pasal 78 KUHP. Antara lain sebagai berikut; sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan; sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; sesudah tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun; sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup; atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu daluwarsa pada keempat penjelasan yang disebutkan diatas, dikurangi sehingga menjadi sepertiga.<sup>40</sup>

Apabila alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) tersebut telah terpenuhi maka penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum maupun kepada tersangka dan keluarganya bahwa proses penyidikan telah dihentikan dikarenakan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP.<sup>41</sup> Dengan dihentikannya

---

<sup>40</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hlm. 27

<sup>41</sup> Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981*

penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.<sup>42</sup>

Menurut Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:<sup>43</sup>

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan berdasar hasil penyelidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera terciptanya kepastian hukum dan keadilan baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

---

*Nomor 76 (KUHP)* menyebutkan bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

<sup>42</sup>*Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)*, Legal Akses (online), <http://www.legalakses.com/surat-penghentian-penyidikan-perkara-sp3/>, diakses 13 Mei 2019

<sup>43</sup> Ibid.

2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi tidak ditemukan cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar pada Pasal 95 KUHP.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik.<sup>44</sup> Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan, dengan tidak menggunakan cara semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukkan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.<sup>45</sup>

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dibuat dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

---

<sup>44</sup> Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 151.

<sup>45</sup> Ibid.

Kemudian dalam hal keberatan penghentian penyidikan, di dalam Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

*“permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*

Dari ketentuan diatas, maka yang berhak mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan adalah penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan (saksi korban). Hal ini bisa terjadi apabila penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan (saksi korban) mempunyai pendapat lain bahwa penghentian penyidikan tidak sah. Misalnya apabila penyidik berpendapat bahwa belum cukup bukti, sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa bukti yang ada pada penyidik sudah cukup untuk menuntut tersangka dalam persidangan.

Bagi saksi korban, hal ini sangat beralasan dan benar-benar dapat diterima akal sehat. Betapa tersiksanya perasaan seorang korban tindak pidana, apabila melihat si pelaku tidak diproses menurut hukum yang berlaku. Atas alasan inilah pemberian hak kepada seorang korban untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>46</sup>

### **C. Tersangka**

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan definisi tersangka adalah:

---

<sup>46</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hlm. 28

*“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*

Tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik. Tersangka diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak yang dimaksud<sup>47</sup> adalah berikut ini:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP)
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 angka a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP)
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)

Ini berarti bahwa karena hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung pada tersangkanya. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan hak itu. Konsekuensinya tanpa didampingi oleh penasehat hukum tidak menghalangi jalannya proses pemeriksaan tersangka.

- f. Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya

---

<sup>47</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op.Cit, hlm. 13-14



- g. Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam dengan hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam 5 tahun atau lebih, dengan biaya cuma-cuma. (Pasal 56 KUHAP)
- h. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. (Pasal 57 ayat (2) KUHAP)
- i. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan. (Pasal 58 KUHAP)
- j. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah. (Pasal 59 dan 60 KUHAP)
- k. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga. (Pasal 61 KUHAP)
- l. Hak untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya. (Pasal 62 KUHAP)
- m. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan. (Pasal 63 KUHAP)
- n. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (*a de charge*). (Pasal 65 KUHAP)
- o. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. (Pasal 67 KUHAP)
- p. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68 KUHAP)
- q. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili. (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman)

- r. Hak kekerabatan atau penahanan atau jenis penahanan.
- s. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7)
- t. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHAP)

Berdasarkan hak-hak tersangka yang telah terurai diatas, KUHAP mengatur secara letat agar hak-hak tersangka tidak dilanggar dan bagi pejabat atau aparatur hukum memperlakukan tersangka bertentangan dengan undang-undang.

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka juga mempunyai kewajiban-kewajiban harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengann undang-undang. Kewajiban-kewajiban tersangka yang terdapat didalam KUHAP antara lain:

- a. Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP)
- b. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP)

- c. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (Pasal 31 KUHAP)
- d. Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP)
- e. Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi (Pasal 79 dan 81 KUHAP)
- f. Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberikan alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP)

#### **D. Teori Kepastian Hukum**

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi setiap individu atau setiap subyek hukum bertindak dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap sesama individu. Adanya aturan itu dalam pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum dan keadilan.<sup>48</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 58

pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang.<sup>49</sup>

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kewenangan-kewenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah).<sup>50</sup> Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>51</sup>

Harlien Budiono mengatajan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>52</sup> Kepastian merupakan bagian dari hukum dan salah satu tujuan dari adanya hukum, yaitu memberikan

---

<sup>49</sup> Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>50</sup> H. Hijmans, dalam *Het recht der wekelijkheid*, dalam Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 208.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.

kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Jika hukum tidak memiliki kepastian maka hukum bisa bersifat ambigu dan memberikan banyak makna.<sup>53</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.<sup>54</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.76

<sup>55</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hal. 82-83.

Mengenai kepastian hukum, siapapun akan setuju bahwa yang bersalah atau telah melakukan tindak pidana haruslah dihukum. Seperti yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :<sup>56</sup>

*”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*

Dalam penegakkan hukum pidana, baik materiil maupun formil, para pihak yang terkait perlu memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkei*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kaedah-kaedah umum yang diatur didalam suatu undang-undang. Sebagai kaedah umum, hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diajukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah-kaedah umum.<sup>57</sup>

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 193 ayat (1) sampai dengan ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76* (KUHAP), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

<sup>57</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bandung, 1993, hal.131.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 158

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan jelas pula penerapannya. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Op. Cit., hlm. 85.